

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 22

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2013

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TENTANG : **INDIKATOR KINERJA DAERAH RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 -
2018**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2013

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 22

2013

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG :

INDIKATOR KINERJA DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);

21. Peraturan.....

21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018.

Pasal 1

Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya disingkat Indikator Kinerja Daerah RPJMD adalah indikator kinerja daerah Kota Sukabumi untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Indikator Kinerja Daerah RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan penjabaran dari 3 (tiga) aspek penyelenggaraan pemerintahan yaitu :

- a. aspek kesejahteraan masyarakat;
- b. aspek pelayanan umum; dan
- c. aspek daya saing daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

Indikator Kinerja Daerah RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 1 Nopember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda
NIP 19580815 198503 1 009

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



REEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TENTANG : INDIKATOR KINERJA DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018

INDIKATOR KINERJA DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013-2018

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP/%)	2,39	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
1.2	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,63	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
1.3	Inflasi (%)	7,71	2 -2,5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
1.4	Tingkat pengangguran terbuka	13,60	12,26	10,92	9,58	8,24	6,90	6,90
1.5	Angka partisipasi angkatan kerja	67,67%	70,67%	73,67%	76,67%	79,67%	82,67%	82,67%
1.6	Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio)	0,341	0,321	0,321	0,321	0,293	0,293	0,293
1.7	Nilai tukar petani	n/a	108	109	110	111	112	112
1.8	Persentase penduduk miskin	9,1	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 1
1.9	Indek Pembangunan Manusia	76,72	77,25	77,77	78,29	78,81	79,34	79,34
1.10	Angka Kematian Bayi	8,4	<24	<24	<24	<24	<24	< 1
1.11	Jumlah grup kesenian aktif	-	21	21	21	21	21	21
1.12	Jumlah gedung olahraga	2	-	1	-	-	3	4
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Angka Partisipasi PAUD	56,15%	56,75%	58%	58,25%	58,75%	59 %	69%
2.2	Jumlah Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100%
2.3	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	99,7%	99,80%	99,85%	99,90%	99,93%	99,95%	99,95%
2.4	Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1%	0,09%	0,08%	0,06%	0,04%	0,02%	0,02%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	98,6%	98,8%	99,0%	99,2%	99,5%	99,7%	99,7%
2.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,2%	0,15%	0,13%	0,11%	0,10%	0,05%	0,05%
2.10	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Angka Lulusan (LS) SMP/MTs	99,82%	99,85%	99,90%	99,95%	99,97%	99,98%	99,98%
2.12	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/Paket C	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.13	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK	0,2%	0,09%	0,08%	0,06%	0,06%	0,02%	0,02%
2.15	Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK ke Perguruan Tinggi	20%	23%	26%	29%	31%	34%	34%
2.16	Angka Lulusan (LS) SMA/SMK	99,75%	99,80%	99,90%	99,93%	99,95%	99,96%	99,96%
2.17	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization	68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18	Rasio puskesmas persatuan penduduk	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.19	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
2.20	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.21	Cakupan masyarakat miskin yang difasilitasi oleh kartu jaminan kesehatan	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
2.22	Aksesibilitas Penduduk Kota	97,72%	98,18%	98,63%	99,09%	99,54%	100%	100%
2.23	Aksesibilitas Jalan Lingkungan	58,14%	64,13%	68,93%	71,28%	73,62%	75,14%	75,14%
2.24	Luas Ruang Terbuka Hijau: Lahan Pemukiman	34,20Ha	34,30 Ha	34,40 Ha	34,50 Ha	34,60 Ha	34,70 Ha	34,70 Ha
2.25	Luas Ruang Terbuka Hijau: Taman Kota dan Jalur Hijau	15Ha	16,50 Ha	18,00 Ha	19,50 Ha	21,00 Ha	21,10 Ha	21,10 Ha
2.26	Luas Ruang Terbuka Hijau: Hutan Kota	3,18 Ha	3,78 Ha	7,08 Ha	9,08 Ha	10,08 Ha	11,08 Ha	11,08 Ha
2.27	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	85,15%	85,28%	85,42%	85,82%	86,09%	86,495	86,49%
2.28	Persentase fasilitas perlengkapan jalan							
	a. Rambu	50%	56%	62%	68%	74%	80%	80%
	b. Marka	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%
	c. APILL siap ATCS	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%
	d. Cermin Tikungan	38%	48%	58%	68%	78%	88%	88%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	e. Pagar Pengaman	13%	15%	17%	19%	21%	23%	23%
	f. PJU	79%	82%	86%	90%	94%	97%	97%
2.29	Jumlah Terminal Tipe A	1 unit (33,33%)	1 unit (100%)	-	-	-	-	1unit(100%)
2.30	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%
2.31	Persentase Penanganan Sampah	83,35%	83,5%	83,63%	83,76%	83,89%	84,02%	84,02%
2.32	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	78,76%	85%	90%	92%	95%	98%	98%
2.33	Cakupan Peserta KB Aktif	67,10%	67,20%	67,45%	67,60%	67,70%	67,75%	67,75%
2.34	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.35	Persentase Posyandu Aktif	30%	31%	31,5%	32%	32,5%	33%	33%
2.36	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	16%	17%	18%	19%	20%	20%
2.37	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	40%	45%	55%	55%	60%	60%
2.38	Jumlah UMKM yang memperoleh penguatan modal	-	-	200 UMK	200 UMK	200 UMK	200 UMK k	200 UMK
2.39	Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar	-	10%	20%	30%	40%	50%	50%
2.40	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1,038	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	26.038
2.41	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	1	-	-	-	-	1
2.42	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/nasional	-	33%	35%	37%	39%	41%	41%
2.43	Persentase unjukrasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama	22,39%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.44	Rasio belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja APBD	≤51%	≤51%	≤51%	≤51%	≤51%	≤51%	≤51%
2.45	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	-	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2.46	Peningkatan pendapatan daerah	Rp. 859.180.759.291,-	Rp. 922.648.000.000,-	Rp. 986.778.000.000,-	Rp. 1.056.307.000.000,-	Rp. 1.131.654.000.000,-	Rp. 1.212.279.000.000,-	Rp. 1.212.279.000.000,-
2.47	Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru	-	-	20 Ha	-	-	-	20Ha
2.48	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.49	Penanganan daerah rawan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.50	Jumlah Kelurahan yang berketegori:							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a. Swasembada	7	7	10	15	18	20	20
	b. Swakarya	21	21	19	15	13	11	11
	c. Swadaya	5	5	4	3	2	2	2
2.51	Cakupan Sosialisasi Program One Day No Rice kepada Masyarakat	-	20%	30%	40%	50%	60%	60%
2.52	Persentase OPD yang mengisi data dan informasi di website resmi	18,18%	60 %	70%	80%	90%	100%	100%
2.53	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	10.000 orang	10.500 orang	11.000 orang	11.500 orang	12.000 orang	12.500 orang	12.500 orang
2.54	Jumlah gedung kesenian	1	1	-	-	-	-	2
2.55	Tingkat konsumsi ikan	19,20 kg/kap/thn	20,00 kg/kap/thn	20,40 kg/kap/thn	20,81 kg/kap/thn	21,22 kg/kap/thn	21,65 kg/kap/thn	21,65 kg/kap/thn
2.56	Jumlah Pengembangan Pasar Tradisional dan pembangunan Pasar Induk	1 unit	1 unit	1	1	1	1	6 unit
2.57	Jumlah kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang	-	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	10 kawasan
2.58	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	0,5 %	1,7 %	1,9 %	2,1 %	2,3 %	2,5 %	2,5 %
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Nilai Investasi PMA (juta)	Rp. 45.978,5,-	Rp. 55.978,5,-	Rp. 67.978,5,-	Rp. 81.978,5,-	Rp. 97.978,5,-	Rp. 115.978,5,-	Rp. 115.978,5,-
3.2	Nilai Investasi PMDN (juta)	Rp. 125.919,-	Rp. 132.214,95	Rp. 133.474,14,-	Rp. 134.733,33,-	Rp. 135.992,52,-	Rp. 137.251,71,-	Rp. 137.251,71,-
3.3	Persentase Perizinan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3.4	Jumlah kawasan ODTW kuliner yang di kembangkan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	6 kawasan
3.5	Jumlah Produk olahan pertanian/ peternakan/ perikanan unggulan yang berkembang dan tersertifikasi	6 Jenis	9 Jenis	11	14	16	17	17

Sukabumi, 1 Nopember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ